BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Pemerintah yang selalu mempunyai kebijakan dalam menjalankan kepentingan untuk kemajuan bersama. Hal ini sejalan dengan pendapat Edi Suharto dalam bukunya *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* bahwa: "Kebijakan adalah sebuah *instrument* pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *government* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik" (Suharto, 2008:03).

Berdasarkan pengertian konsep Analisis kebijakan tersebut memberikan keterangan bahwa kebijakan yang ada dengan dasar yang kuat, dari sisi *goverment* yang lebih diperhatikan karena sebagai pengelola program pemerintahan. Hal ini karena dalam proses implementasinya haruslah memiliki arah tujuan yang benar-benar jelas, hal tersebut tidak lain untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang ada.

Karakter dari kebijakan publik yang dikemukakan oleh Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* adalah : "Suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yaitu dengan langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program atau melalui formasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut"(Nugroho, 2004:158).

Berdasarkan pengertian di atas maka kebijakan menurut karakternya adalah langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program dalam proses pembuatan kebijakan. Analis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program publik. Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengabilan keputusan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam mengahadapi kemajuan masa yang akan datang

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah:

> "Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan" (Fredrickson dan Hart, 2003:12).

Berdasarkan pengertian kebijakan tersebut memberikan keterangan bahwa kebijakan yang lebih mengarah ke tujuan, adanya hambatan-hambatan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut tidak lain untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang ada. Masyarakat adalah sebagai sasaran utama dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, suatu pencapaian paling tinggi dalam pemerintahan yaitu suksesnya kebijakan yang di keluarkan pemerintah yang bisa berjalan dengan baik.

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Magill kebijakan adalah:

> "Suatu usaha meliputi semua kebijakan ekonomi, transportasi , komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik).Kebijakan sosial merupkaan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial" (Magill, 1999: 10).

Berdasarkan pengertian kebijakan tersebut memberikan keterangan bahwa kebijakan yang lebih mengarah kepada berbagai bidang yang diperhatikan dan memiliki tujuan. Adanya tipe-tipe dari kebijakan tersebut maka beragam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengembangkan daerahnya untuk lebih maju. Hal tersebut tidak lain untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang ada.

Adapun menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Tangkilisan, 2003:2). Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan

seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik. Menurut M. Irafan Islamy berpendapat bahwa:

> "Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga *policy* lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata *wisdom"* (Islamy, 1997:5).

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Hal ini merupakan suatu proses kebijakan pemerintah melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan demi berjalannya program pemerintah yang telah ditetapkan.

Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum proses kebijakan dikelompokan menjadi tiga, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai (Hogwood and Gunn, 2003:5).

Berdasarkan pengertian kebijakan secara umum tersebut maka kebijakan terdiri dari proses pembuatan kebijakan, implementasi, evaluasi yang merupakan

proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan. Maka dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu, hal tersebut tidak lain untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang ada. Adanya suatu kebijakan oleh pemerintahan yaitu berbagai proses dalam melakukan atau menjalankan suatu program pemerintah yang sedang berjalan maupun yang belum berjalan

Pemerintah yang selalu mempunyai kebijakan dalam menjalankan kepentingan untuk kemajuan bersama. Hal ini sejalan dengan pendapat Marshall dalam bukunya *Implementasi Kebijakan Publik* bahwa : "Kebijakan adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak yang langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan"(Marshall, 2003:21).

Menurut pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tindakan yang memiliki dampak yang langsung terhadap kesejahteraan warga negara. Kebijakan seyogyanya diarahkan melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Pemerintah dalam hal ini sangat berperan penting untuk menentukan kebijakan yang akan di laksanakan dan yang sesuai dengan potensi daerahnya.

Adapun kebijakan publik yang berdasarkan peningkatan kualitas pelayanan kemasyarakatan dan sumberdaya manusia menurut Dalton dan Smith kebijakan adalah :

> *"In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people's live by providing a range of income support, community services and support programs".* Yang berarti, *Kebijakan Public* secara singkat menunjuk pada apa yang

> dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya (Dalton dan Smith**,** 2006:4)**.**

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada pemberian beragam tunjangan pendapatan serta pelayanan terhadap masyarakat dan program-program tunjangan sosial lainnya. Kebijakan ini diarahkan melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Pemerintah dalam hal ini sangat berperan penting untuk mengatur dan mengetahui kebutuhan masyarakat secara nyata.

Adanya suatu kebijakan dalam meneliti kekurangan apa yang terjadi dalam suatu program pemerintah. Menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu :

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
2. Adanya *output* kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat

(Woll, 2003:2).

Berdasarkan pengertian kebijakan sesuai pengaruh dalam pelaksanaannya yaitu memilih kebijakan atau keputusan dari pemerintah, melihat penganggaran pada program kerja pemerintah dan melihat dampak yang akan terjadi atas adanya kebijakan tersebut, hal tersebut tidak lain untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang ada. Adanya dampak suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu berhasilnya suatu program yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

2.2 Analisis Kebijakan

Suatu negara memerlukan adanya kebijakan untuk mengatur pemerintahan. Kebijakan yang dibuat pemerintah ditujukan untuk mengarahkan tindakan-tindakan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Menurut Joko Widodo definisi analisis di dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik* melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis (Widodo, 2009:13).

Berdasarkan pengertian tersebut maka analisis merupakan suatu pemahaman dari suatu hal yang diperoleh melalui penyelidikan sehingga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Proses analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* adalah : "suatu aktivitas intelektual yang praktis yang di tujukan untuk menciptakan secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan" (Dunn, 1998:44).

Berdasarkan pengertian di atas maka analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan dan dalam proses pembuatan kebijakan. Analis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program publik. Analisis tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengabilan keputusan oleh pemerintah.

Suatu analisis yang dilihat dari sisi mekanisme dan substantif, analisis dapat dilihat dari berbagai perspektif. Subagyo Halim menjelaskan analisis dapat di lihat dari :

1. Secara Mekanis, dalam tahapan analisis akan terjadi:
    a) Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data jadi informasi yang lebih mudah dipahami.
    b) Penggunaan alat analisis yang bermanfaat untuk membuktikan hipotesis ataupun pendeskripsian *variabel riset* secara benar, bukan kebetulan saja.
    c) Penginterprestasian berbagai informasi dalam kerangka yang lebih luas, atau inferensi ke populasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.
2. Secara Substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses :
    a) Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan.
    b) Mencari dan menentukan konsep baru dari data yang dikumpulkan.
    c) Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau baru terjadi bila ada kondisi tertentu

(Halim, 2002:35).

Berdasarkan sisi mekanisme dan substantif diatas maka adanya persepektif analisis baik dilihat secara mekanis atau substantif, maka akan lebih memudahkan dalam menganalisis kebijakan yang dilakukan para penelaah. Selain itu, kita dapat menentukan dari sisi mana kita akan menganalisis.

Analisis merupakan aktivitas untuk menciptakan pengetahuan. Analisis diperlukan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang dihadapi dalam suatu aktivitas. Adapun terdapat beberapa macam analisis sesuai dengan kegunaannya, yaitu :

1. Analisis Teknikal

    Analisis teknikal adalah analisis yang dimulai dengan cara memperhatikan instansi itu sendiri dari waktu ke waktu.

2. Analisis Kekuatan Relatif

   Analisis Kekuatan Relatif adalah analisis yang berupaya mengidentifikasikan masalah yang memiliki kekuatan relative terhadap masalah lain.

3. Analisis Fundamental

   Analisis Fundamental adalah suatu sekuritas memiliki nilai intrinsic tertentu (nilai tingkah laku) nilai intrinstik.

   Suatu sekuritas ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya, faktor tersebut data dari instansi. Analisis ini akan membandingkan nilai intrinsik suatu sekuritas dengan tingkah laku pegawai guna menentukan apakah sudah dapat diterapkan atau belum. Analisis ini akan memahami dan akhirnya mengevaluasi kinerja pegawai yang diterapkan.

4. Analisis Instansi Individual

   Analisis Instansi Individual adalah analisis yang dilakukan dengan mengamati kinerja fungsi-fungsi instansi dan kepemimpinan para pegawai. Analisis itu akan mengetahui perkembangan dan kondisi kerja pegawai.

(Halim,2002:40).

Berdasarkan pengertian diatas tersebut maka analisis merupakan suatu pemahaman dari suatu hal yang diperoleh melalui langkah-langkah analisis sehingga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya. Demikian dengan adanya

beberapa macam analisis diatas maka akan dapat diketahui apakah tujuan analisis tersebut.

Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty (2002:52), kata analisis dapat diartikan sebagai berikut :“penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan menurut Syahrul dan Mohammad Ardi Nizar (200:48)” kemudian yang dimaksud menganalisis adalah:“melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akutansi dan alasan–alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.”

Berdasarkan pengertian diatas yaitu pemahaman pada penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat bahwa analisis merupakan kegiatan memperhatikan, mengatasi dan memecahkan sesuatu (mencari jalan keluar) yang dilakukan seseorang.

Berbagai cara dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab akibat, dan kinerja serta program kebijakan. Menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan analisis kebijakan adalah penentuan alternatif dari kebijakan yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif kebijakan (Tangkilisan, 2003:1**).** Adapun analisis kebijakan menurut Budi Winarno berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan (Winarno, 2005:27).

Dari dua definisi analisis kebijakan di atas bahwa analisis kebijakan merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian atau

penyelidikan sebuah sebab akibat dari suatu kebijakan yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif program serta kinerja kebijakan.

Adapun hal yang menjadi pokok dalam analisis kebijakan, kita dapat menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu. Analisis kebijakan dapat dilakukan tanpa mempunyai kecenderungan untuk menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan yang ada sebelum keputusan terjadi. Pada dasarnya terdapat tiga hal pokok dalam menganalisis kebijakan yaitu:

1. Fokus utama adalah mengenai penjelasan / anjuran kebijakan yang pantas
2. Sebab-sebab dan konsekunsi dari kebijakan diselidiki dengan menggunakan metodologi ilmiah
3. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan kebijakan-kebijakan dan pembentukannya. Sehingga dapat diterapkan kepada lembaga dan bidang kebijakan yang berbeda.

(Tangkilisan, 2003:3).

Berdasarkan hal pokok dalam menganalisis kebijakan yaitu pemahaman yang pantas terhadap apa yang menjadi sebuah kebijakan, serta mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan kebijakan-kebijakan dan pembentukannya. Sehingga dapat diterapkan kepada lembaga dan bidang kebijakan yang tidak sama.

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. diantaranya yang dikemukakan oleh William N. Dunn (1998:25) dalam bukunya *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* yang mengajukan Lima faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu analisis kebijakan tersebut adalah:

1. Perumusan Masalah Kebijakan, yaitu dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan Masalah Kebijakan terdiri dari beberapa indokator yaitu :
   a. Analisis Batas, yaitu memperkirakan apakah sistem formulasi masalah individual yang kita sebut *metaproblem* relatif lengkap.
   b. Analisis Klasifikasi, yaitu teknik untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan kondisi permasalahan.
   c. Analisis Hirarki, yaitu teknik untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang mungkin dari suatu masalah.
   d. *Synecties,* yaitu suatu metode yang diciptakan untuk mengenali masalah-masalah yang bersifat analog.
   e. *Brainstorming*, yaitu metode untuk menghasilkan ide-ide dan tujuan yang membantu untuk mengidentifikasi masalah.
   f. Analisis perspektif berganda, yaitu metode untuk memperoleh pandangan yang lebih banyak mengenai masalah-masalah dan peluang pemecahan secara sistematis.
   g. Analisis asumsi, yaitu teknik yang bertujuan mensintesiskan secara kreatif asumsi-asumsi yang bertentangan dengan masalah kebijakan.
   h. Pemetaan argumentasi, yaitu teknik yang menggabungakan pendapat-pendapat dengan informasi bebijakan yang sama, akan menghasilkan pengetahuan yang bertentangan.

Berdasarkan perumusan masalah kebijakan tersebut memberikan beberapa indikator yang bisa memudahkan dengan menambah pengetahuan yang *relevan* dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah kebijakan.

2. Peramalan Kebijakan, yaitu meyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari di ambilnya alternatif. Peramalan Kebijakan terdiri dari beberapa indokator yaitu :
   a. *Proyeksi*, yaitu ramalan yang didasarkan kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan dan dapat diperkuat dengan pendapat-pendapat para otoritas.
   b. *Prediksi,* ramalan yang berdasarkan pada asumsi teorretik yang tegas.

c. Perkiraan, ramalan yang didasarkan pada penilaian informasi atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat masa depan.

Berdasarkan Peramalan Kebijakan tersebut memberikan beberapa indikator yang bisa memudahkan dengan meyediakan pengetahuan yang *relevan* dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari di ambilnya alternatif.

3. Rekomendasi Kebijakan, yaitu membuahkan pengetahuan yang *relevan* kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diterapkan melalui peramalan. Rekomendasi Kebijakan terdiri dari beberapa indokator yaitu :
   a. Pengambilan Keputusan Tunggal, yaitu pilihan yang harus dibuat oleh satu orang saja, yang dapat mempengaruhi orang banyak.
   b. Kepastian, yaitu hasil pilihan yang harus diketahui dengan pasti.
   c. Kecepatan, yaitu hasil tindakan harus segera terjadi.

Berdasarkan Rekomendasi Kebijakan tersebut memberikan beberapa indikator yang bisa memudahkan dengan membuahkan pengetahuan yang *relevan* kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diterapkan melalui peramalan.

4. Pemantauan Kebijakan, yaitu menyediakan pengetahuan yang diambil dari kebijakan sebelumnya. Pemantauan Kebijakan terdiri dari beberapa indikator yaitu :
   a. Kepatuhan, yaitu untuk menetukan apakah tindakan para aparatur sesuai standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator.
   b. Pemeriksaan, yaitu membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran.
   c. Akuntansi, *monitoring* menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi.
   d. *Ekplanasi*, yaitu pemantauan juga menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda.

Berdasarkan Pemantauan Kebijakan tersebut memberikan beberapa indikator yang bisa memudahkan dengan menyediakan pengetahuan yang diambil dari kebijakan sebelumnya.

5. Penilaian Kebijakan, yaitu membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar yang dihasilkan.
    a. Evaluasi Semu, yaitu menghasilkan informasi yang *valid* dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan.
    b. Evaluasi *Formal*, yaitu menghasilkan informasi valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar program kebijakan.

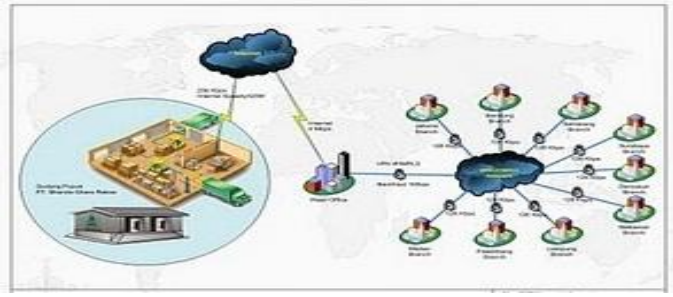
(Dunn, 1998:25).

Berdasarkan Lima faktor analisis kebijakan di atas maka, analisis kebijakan terdiri dari beberapa tahapan dan metode yang dilaksanakan. Bermanfaat bagi analis sebagai pedoman utama dalam menghasilkan atau mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

2.3 KTP *Online*

Menurut (http://bgritsupport.blogspot.com) yaitu, KTP *Online* yang bersifat *internal* dapat diartikan sebagai berikut :“Jaringan *internal* adalah jaringan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang tergabung dalam satu member, *privat* diperlukan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi *online* yang bersifat *internal”*. untuk lebih jelas dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 2.1
Jaringan *internal* KTP *Online*



Sumber : (http://bgritsupport.blogspot.com Tahun 2011).

Berdasarkan gambar di atas yaitu selain itu media ini juga biasa digunakan untuk bertukar data baik melalui *folder sharing* maupun media lainnya secara aman, artinya bebas dari intervensi dan penyusupan dari pihak luar. Hal ini menggambarkan bahwa adanya keterkaitan antara jaringan satu dengan yang lainya, serta saling berhubungan dengan keamanan yang sesuai dengan prosedur.

KTP merupakan salah satu bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap penduduk diatas 17 tahun, atau telah/ pernah menikah wajib memiliki KTP, masa berlaku KTP bagi yang berusia 17 tahun sampai dengan usia dibawah 60 tahun adalah 5 tahun. Bagi penduduk yang berusia diatas 60 tahun masa berlaku KTP adalah seumur hidup, KTP diterbitkan untuk permohonan baru, terjadi perubahan data, rusak, hilang dan habis masa berlakunya.

Proses pembuatan KTP masyarakat melakukannya melalui beberapa tahap, mulai dari RT, RT, Kantor Kelurahan atau Desa sampai dengan Kantor Kecamatan. Tahapan-tahapan tersebut sering memakan waktu yang cukup lama dan tidak hanya itu pada saat proses pendaftaran permohonan pembuatan KTP di Kantor Desa/ Kecamatan di Kabupaten Purwakarta.

Ada juga syarat perpanjang KTP yang di antaranya, *Pertama,* mengisi formulir registrasi secara lengkap (Perpanjangan tidak akan diproses jika belum lengkap). *Kedua, scan foto* / menggunakan *foto digital* dalam *format jpeg,* Maksimal 200 KB. (Untuk tahun lahir ganjil menggunakan latar belakang merah, untuk tahun lahir genap menggunakan latar belakang biru). *Ketiga, scan* tanda tangan menggunakan latar belakang putih polos dalam bentuk *format jpeg,* maksimal 200 KB. *Keempat*, menyiapkan KTP yang sudah habis masa berlakunya untuk diambil oleh petugas pengantar KTP. *Kelima*, menyiapkan *foto copy* KK untuk diambil oleh petugas pengantar KTP. *Keenam*, mengisi nomor telepon / HP yang bisa dihubungi untuk konfirmasi lebih lanjut. *Ketujuh,* Anda bisa melakukan registrasi apabila anda sudah memiliki Kartu Keluarga (KK).

Pada dasarnya pengelolaan KTP adalah suatu satu bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga menjadikan program KTP *online* sebagai salah satu program yang strategis dan penting kontribusinya untuk keberhasilan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional.

Pelayanan yang cepat diperlukan oleh masyarakat berarti bahwa setiap individu di berbagai negara dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara *(mediasi*) apapun. Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba cepat dan mudah melalui teknologi *digital* menjadi suatu tuntutan, penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat.

Maka demi terciptanya pelayanan yang baik terhadap masyarakat, saat ini dengan adanya KTP *Online* yang dilakukan secara terpadu, tertib dan berlanjut serta dikelola secara profesional dengan memanfaatkan dan memadukan unsur-unsur fungsional, saran dan prasarana baik secara *intern* maupun *ekstern*. Serta tidak hanya melalui komunikasi satu arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya, akan tetapi juga komunikasi dua arah, yaitu masyarakat dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi kepada pemerintah.

Adapun pelayanan KTP *Online* ini masih mempunyai kendala yaitu masih ada daerah yang menemui kendala jaringan sehingga perangkat tidak bisa dioperasikan dan pelayanan pembuatan KTP *Online* gratis tidak maksimal. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta hanya menyediakan operator dan perangkat, kalau jaringan adalah urusan pihak Hubungan Antar Lembaga (Hubtarga) Setda Kabupaten Purwakarta yang sudah bekerja sama dan memberdayakan fasilitas yang ada yaitu Telkom dan Telkomsel.

KTP *Online* saat ini telah memiliki pendukung yang berupa dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Lalu, Peraturan Bupati Purwakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

KTP *Online* dapat digunakan untuk pencarian orang karena di dalam progam telah di lengkapi dengan fasilitas *search* untuk mencari data penduduk, sehingga progam ini bermanfaat untuk membantu polisi dalam mencari orang hilang atau

kriminal. Hal ini dapat diketahui dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2007, tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Tetapi dalam penampilan data dibatasi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dari pemanfaatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Kemajuan teknologi secara cepat merupakan suatu kemajuan pemerintah dalam program-program yang utama saat ini. Menurut Oliver Wendell Holmes dalam bukunya *Sains & Teknologi Jilid 2* menjelaskan pengertiannya yaitu :"Kegunaan Teknologi Informasi untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya"(Holmes, 2000:2).

Definisi tersebut mengatakan bahwa *E-Government* adalah pelayanan yang sudah mengalami pemprosesan dimana yang sebelumnya belum dapat dimanfaatkan secara langsung mengalami proses pengolahan dapat mengefisienkan biaya, hal tersebut dapat dimanfaatkan dan menjadi informasi yang berguna.

Melengkapi teori tersebut yang di uraikan mengenai pengertian sistem, data dan informasi, melengkapi pandangan tersebut, maka diuraikan mengenai sistem, data dan informasi, M. Khoirul Anwar dalam buku *SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah* menjelaskan pengertian sistem, sistem adalah "seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan"(Anwar, 2004:4). Dimana satu dengan yang lain saling mendukung untuk terlaksananya

sistem tersebut sehingga menjelaskan bahwa sistem yang ada tidak dapat berdiri sendiri dimana dalam sistem harus ada keterkaitan yang menjadi pengikat sistem itu sendiri.

Pendapat yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa sistem merupakan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Bedasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa sistem itu merupakan suatu kesatuan rangkaian kerja yang dapat menghasilkan sesuatu dari hasil rangkaian-rangkaian tersebut. Sesuatu yang dihasilkan oleh rangkaian-rangkaian tersebut tidak lain adalah data.

Merencanakan dan menganalisa perancangan suatu sistem terlebih dahulu harus mengatahui lebih dahulu mengenai komponen-komponen yang ada dalam 10 sistem tersebut baik itu tentang data dan informasi. Dikatakan bahwa data merupkan bentuk dasar dari sebuah informasi, sedangkan informasi merupkanan elemen yang dihasilkan dari suatu bentuk pengelohan data.

Hal ini akan memudahkan dalam perencanaan dan pengembilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Ladjamudin dalam bukunya: *Analisis dan desain Sistem Informasi*, bahwa: sistem informasi merupakan "sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat pelaksanaan akan memberi informasi bagi pengambil keputusan dan/ atau untuk mengendalikan organisasi"(Ladjamudin, 2002:13). Dengan demikian suatu organisasi mendukung kegiatan yang ada dengan perencanaan dan dan ketepatan waktu sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Suatu informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, dan suatu informasi mengambarkan

kejadian-kejadian nyata yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan.

Pengolahan data secara elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dengan menggunakan komputer yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan dan pengawasan hasil pengolahan tersebut. Mc Leod suatu informasi berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut dianggap.
b. Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
c. *Relevan* artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
d. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan"

(Mc Leod, 2001:61).

Berdasarkan pengolahan data secara elektronik yaitu dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda. untuk suatu organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi Sehingga dapat diterapkan kepada lembaga dan bidang sistem pada penyimpanan dan pengawasan hasil pengolahan tersebut.